

# **ROLE PLAYERS ANALYSIS DALAM KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

***(Studi Kasus Konflik Pertambangan Mangan Di Kabupaten Timor Tengah  
Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2011)***

**Ignasius Usboko**

## **Abstarct**

*Manganese mining conflicts in South Central Timor Regency in 2010-2011 is still echoing, especially from the perspective of developmentalism and neoliberalism paradigms. It also can be seen as a paradox of economic development. This study aims to describe and analyze the nature of this conflict in terms of actors, parties, interests, dynamics and its resolutions. By employing Wirawan's theoretical model of conflict resolutions, this research showed findings as follows: (1) Manganese mining conflicts occurred within six phases, however, the conflict remains unresolved (2) Actors involved are East Nusa Tenggara local government, South Central Timor local government, East Nusa Tenggara Parliament, South Central Timor Parliament, PT SMR, Obama, Landlord. Role in the conflict based on power, interests and goals of the actors (3) Conflict resolution is done by doing the more positive approach of law enforcement through the court process while the use of alternative problem solving only the latent phase and phase triggers.*

*Keywords: Conflict, Conflict Resolutions, Role Players Analysis.*

## **A. PENDAHULUAN**

Konflik pertambangan mangan di Kabupaten TTS tahun 2010-2011 dan konflik pertambangan di daerah lain seantero bumi Indonesia timbul sebagai akibat biasanya pandangan terhadap Sumber Daya Alam (SDA), terdegradasinya lingkungan dan tergerusnya masyarakat yang kemudian menjadi sulit untuk diselesaikan karena mengalami eskalasi bahkan krisis yang sarat dengan kepentingan dan kekuasaan yang tidak terdistribusi secara adil. Konflik itu menjelaskan kepentingan, kekuatan dan kerentanan berbeda dari kelompok sosial berbeda yang didasari oleh keprihatinan terhadap keadilan sosial dalam pemanfaatannya (Turner dalam Indra Gumay Febriano dkk, 2015).

Gambaran konflik diatas menunjukkan terciptanya dua kondisi sekaligus bahwa pada satu sisi terpacunya pertumbuhan ekonomi dan pada sisi lain tertimbul dampak lingkungan, ketimpangan dalam masyarakat. Hal ini dipandang sebagai paradoks pembangunan ekonomi yaitu tingginya pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melimpah ruah, namun kualitas lingkungan hidup terus menurun, kemiskinan meningkat dan pengangguran menghantui jalannya pembangunan (Moch. F. Cahyono dkk, 2013: 1), kondisi demikian dipahami

sebagai dominasi paradigma pembangunanisme dan neoliberalisme yang sangat ekonomi sentris (Wasisto R. Jati, 2012: 98).

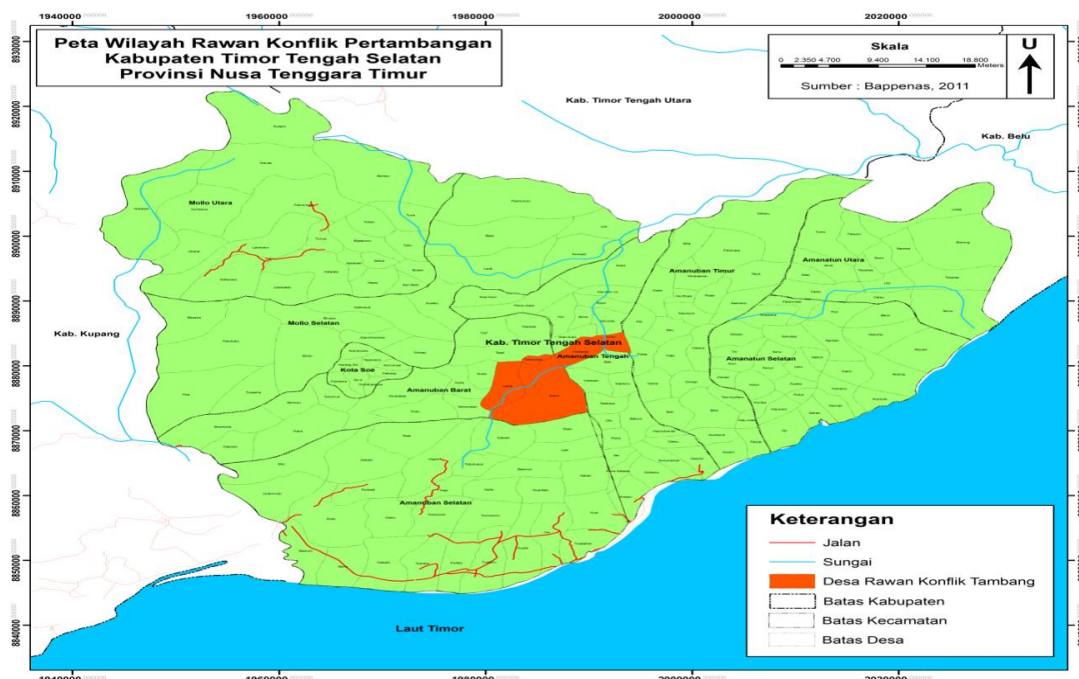
Maka sebenarnya bentangan realitas yang berkarakter anomali dan naungan konseptual dan ideologi yang invisibel telah melahirkan paradigma tata kelola SDA dari yang semula *economic development* menuju *sustainable development* pada pertengahan tahun 1990-an yang melahirkan cara pandang baru yaitu pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang mana hal ini telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 yang terjabar pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 12 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 95 (d), (e), Pasal 98.

Regulasi tersebut juga jelas menyatakan bahwa pengelolaan SDA harus menciptakan keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi regulasi tersebut berkaitan dengan SDA yang bersifat terbatas sehingga dalam prinsip ekonomi disebutkan bahwa manusia rasional akan memperebutkan sumber daya yang langka (*scarce*) apabila ada padanya pilihan-pilihan (*choices*) yang paling menguntungkan. Kompetisi tersebut tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi tetapi menimbulkan konflik karena para pelaku ekonomi dan para politisi bertindak tidak rasional berkaitan dengan kebijakan publik, sering memutuskan kebijakan publik tidak sesuai amanah yang diembannya (Cahyono dkk 2013: 1). Sementara itu, dalam studi politik, kekuasaan dipahami sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya (Surbakti dalam Haryanto 2005: 5). Maka pada tataran ini kekuasaan dan kepentingan menjadi faktor pertimbangan seseorang dalam menjalankan peran terhadap pengelolaan pertambangan.

Konflik pertambangan mangan antara masyarakat dengan pemerintah daerah terjadi karena kebijakan tidak partisipatif, kebijakan diatur tidak memenuhi hak-hak masyarakat termasuk harga mangan dan kelestarian lingkungan. Konflik antara PT SMR dengan Obama disebabkan oleh penyerobotan wilayah IUP PT SMR, PT SMR yang diskriminatif. Konflik antara Pemilik Lahan dengan PT SMR disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak yang semestinya diberikan oleh PT SMR. Konflik antarpemilik lahan disebabkan oleh meningkatnya nilai ekonomi lahan yang dipicu harga mangan. Konflik itu terjadi di lima desa yaitu Desa Supul, Desa Lakat dan Desa Tubmonas (Kecamatan Kuatnana), Desa Noebesa dan Desa Tumu (Kecamatan Amanuban Tengah) seperti yang tergambar dalam peta konflik pertambangan mangan berikut.

**Gambar 1.1**

**Peta Konflik Pertambangan Mangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan**



Sumber: Data Sekunder yang Diadaptasi, 2015

Gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa wilayah IUP yang menjadi lokasi konflik meliputi 4.550 Ha dan masa operasi produksi selama 25 tahun. Wilayah yang cukup luas dan operasi produksi dalam waktu yang cukup lama, justru terjadi konflik sejak awal hadirnya PT SMR maka yang telah menimbulkan dampak-dampak yang tidak diharapkan masyarakat. Pada 2011, pemerintah Kabupaten TTS membuat Perda

tentang Mangan namun belum diimplementasikan, hanya dapat melakukan fungsi pengendalian melalui Dinas Pertambangan dan Energi, pemberlakuan kartu kendali yaitu untuk mengetahui tonase mangan yang dikeluarkan investor. Gubernur NTT menggodok Pergub tentang Pertambangan, meningkatkan nilai tambah pertambangan bekerja sama dengan Australia membangun unit pemurnian mangan (smelter) di Silawan, Kabupaten Belu, NTT dengan tujuan mengembangkan industri pertambangan dan pengolahan terpadu sepenuhnya di wilayah tambang<sup>1</sup>, untuk menyikapi konflik yang terjadi.

Konflik tersebut dipengaruhi oleh kondisi penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten TTS mengalami peningkatan dari tahun 2008-2012 yaitu 2008 (417.942 jiwa) dan 2012 (453.386 jiwa). Penambahan penduduk sebanyak 35.444 jiwa dan penambahan ini didominasi oleh perempuan: 18.986 jiwa dengan Penduduk miskin tahun 2011:122.300 jiwa<sup>2</sup>. Kontribusi lapangan pekerjaan didominasi oleh sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja 154.376 pada 2008, dan menurun menjadi 148.347 pada 2012. Serapan

<sup>1</sup> Lihat <https://www.lintasntt.com>. Diunduh pada 12 April 2015 Pukul 08:30 WIB.

<sup>2</sup> *op. cit.*, lih (11)

sektor pertanian cenderung menurun pada 2011-2012 yaitu 14.089 orang, pada saat yang sama terjadi peningkatan pada sektor perdagangan, industri dan jasa. Pendapatan perkapita menurut dasar harga konstan, tahun 2010: 2.163.081, 2011: 2.209.457 sedangkan atas dasar harga berlaku, tahun 2010: 5.066.689, 2011: 5.650.376.<sup>3</sup>

Gambaran kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat khususnya yang berada di sekitar wilayah IUP PT SMR sebagian beralih pada pertambangan mangan padahal umumnya masyarakat TTS bergantung pada sektor pertanian. Namun didorong oleh penghasilan kerja mangan yang cukup bagus dan sektor pertanian yang kurang memberi penghasilan yang cukup karena faktor iklim, faktor topografi maka masyarakat beralih profesi menjadi penambang. Pada saat yang sama masyarakat belum cukup memahami pertambangan terutama dampaknya, masyarakat lebih tertarik pada tawaran harga mangan yang cukup bagus maka menimbulkan konflik.

Sumber daya tambang seperti mangan merupakan kepentingan ekonomi karenanya akan melibatkan banyak pelaku ekonomi yang kuat bahkan yang memiliki dana untuk melakukan *lobbying* mempengaruhi pembuat kebijakan atau memiliki dana untuk melakukan transaksi ekonomi. Hubungan antara *rent seeker* dengan pembuat kebijakan atau hubungan antara pihak yang berkepentingan dalam pertambangan dengan pemerintah daerah atau antarmasyarakat akan membentuk suatu koalisi untuk meraup kepentingan ekonomi semaksimal mungkin (Buchanan *et al* dalam Sugiyanto 2002).

Bertolak dari gambaran realitas diatas maka dapat digunakan model proses konflik Wirawan, teori stakeholder Freeman dan teori konflik Dahrendorf dalam paradigma fakta sosial dengan pendekatan analisis deskriptif jenis studi kasus untuk menyingkap peran aktor yang memiliki akses terhadap SDA - mangan. Menurut Bryant and Bailey (1997), dalam konteks pengelolaan SDA, aktor pertama adalah Negara, kemudian pengusaha dan yang terakhir rakyat jelata yang merupakan aktor yang paling lemah dan hampir selalu mengalami proses marginalisasi atau rentan terhadap berbagai bentuk degradasi lingkungan karena manusia dan alam dilihat sebagai komoditas dan nilai tukar semata, (Bryant and Bailey dalam Sulthan Zainuddin dkk, 2012).

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan penelitian ini adalah 1) menggambarkan fase konflik pertambangan mangan; 2) menganalisis peran aktor dalam konflik pertambangan mangan dan 3) menemukan potensi penyelesaian konflik pertambangan mangan.

### **A.1. Model Proses Konflik Wirawan**

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem sosial, bangsa, suku, agama, kepercayaan aliran politik, budaya

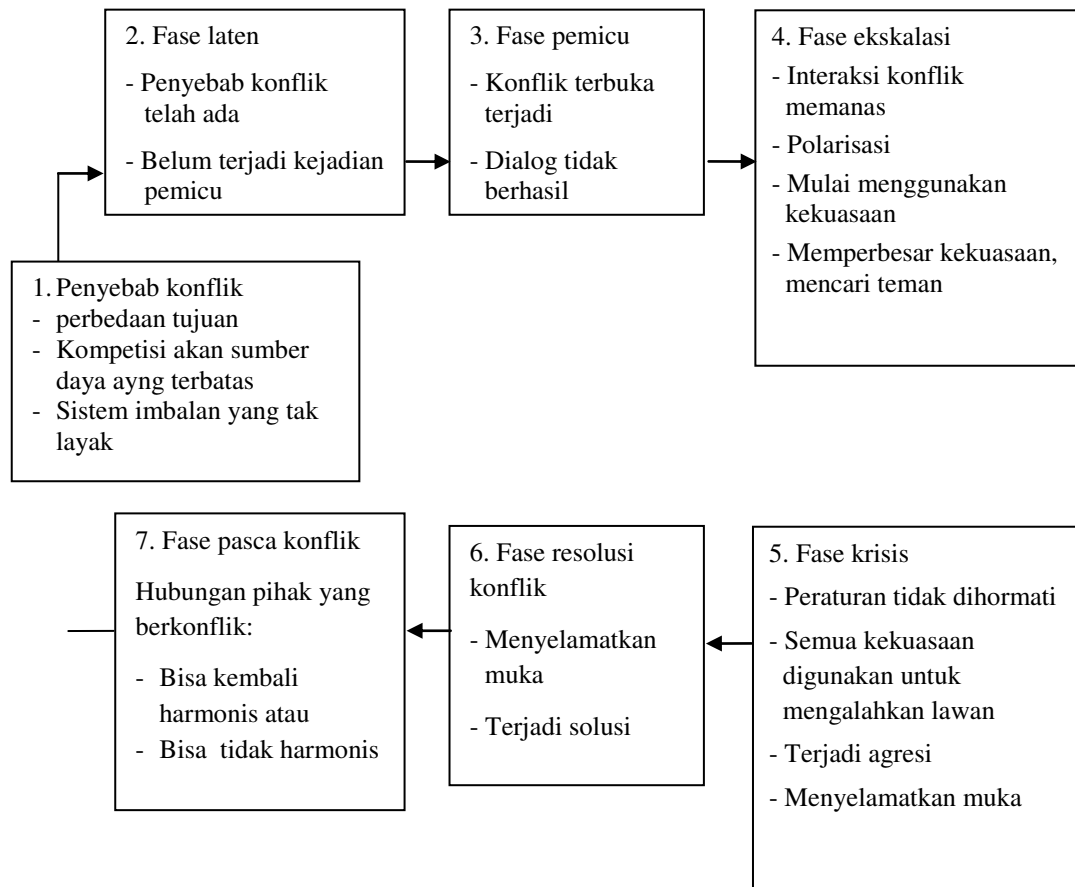
---

<sup>3</sup> Lihat TTS Dalam Angka Yang Diolah Tahun 2012.

dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik.

Suatu model konflik yang dikembangkan Wirawan nampaknya lebih melengkapi pembagian tipe konflik Fizher di atas. Hal ini juga relevan dengan konflik pertambangan mangan yang terjadi. Adapun model konflik yang dimaksud seperti pada Gambar 1.2 tentang Model Proses Konflik berikut.

**Gambar 1.2**  
**Model Proses Konflik Yang Diadaptasi Penyusun**



Sumber: Wirawan (2010)

Gambar 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pada hakikatnya konflik dapat terjadi secara melingkar atau siklus. Konflik dimaksud akan diawali oleh faktor-faktor sebab, yang dapat diyakini bahwa konflik tidak mungkin terjadi tanpa adanya faktor sebab. Faktor sebab inilah yang mempengaruhi terjadinya konflik. Memahami adanya sebab konflik maka itu merupakan awal proses konflik ketika muncul sesuatu kejadian/peristiwa pemicu, para pihak mulai menyadari adanya konflik.

Sehingga konflik akan mengalami eskalasi dan bahkan akan berkelanjutan pada konflik yang bersifat terbuka dan melibatkan berbagai pihak dan berpengaruh besar. Konflik dapat terus berlanjut karena tidak ada upaya untuk menyelesaikannya. Setelah konflik mencapai eskalasi dan krisis maka proses berikutnya adalah resolusi konflik sehingga tercipta kondisi baru pada pascakonflik.

Setiap sistem hukum dan sistem politik berfungsi mengelola konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat agar tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan. Oleh karena itu diperlukan sarana pengelolaan konflik. Dalam literatur, disebut sarana pengelolaan konflik meliputi penggunaan berbagai alat analisis konflik dan pemetaan konflik, penguatan institusi demokratis dan tersedianya berbagai bentuk penyelesaian konflik yang sah. Di dalam literatur maupun praktik kehidupan bernegara di Negara-negara lain dikenal beberapa bentuk penyelesaian konflik yaitu negosiasi, mediasi, keputusan pejabat administrasi, arbitrase, proses pengadilan dan keputusan legislatif (M. Mukhsin Jamil 2007: 173-174).

## **A.2. Teori Konflik Dahrendorf**

Pada masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan sebagai refleksi dari kekuasaan. Setiap golongan diikat oleh kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan langsung. Pertentangan ini dapat terjadi dalam situasi dimana golongan yang berkuasa mempertahankan status quo dengan cara memberi instruksi kepada golongan yang dikuasai selain juga golongan ini berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pada gilirannya diferensiasi kepentingan melahirkan kelompok konflik potensial dan kelompok konflik aktual yang berbenturan karena memiliki kepentingan yang antagonistik (Garna 1992, Veeger 1993). Lebih lanjut Dahrendorf membedakan kelompok yang terlibat konflik itu atas tiga tipe yaitu kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*) dan kelompok konflik. Kelompok semu adalah kelompok pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik sosial dalam masyarakat (Ritzer 1992)<sup>4</sup>. Kelompok konflik adalah kelompok yang terlibat dalam konflik aktual. Oleh karena itu tiga konsep utama yang dianalisis dahrendorf adalah kekuasaan, kepentingan dan kelompok konflik sosial.

Berdasarkan teori diatas, dapat dijelaskan bahwa konflik pertambahan mangan merupakan realitas yang membentuk struktur sosial yang dipengaruhi oleh aktor yang memiliki otoritas dalam

---

<sup>4</sup> Lihat <https://www.aifis.org/wp-content/upload/2013/12/Dilema-24-2010.pdf> Diunduh pada 23 April 2015 Pukul 08:25 WIB.

pembuatan kebijakan dan pengelolaan pertambangan mangan yang kemudian terlibat konflik dengan aktor yang tidak memiliki otoritas. Aktor tersebut saling bertentangan dengan mempengaruhi

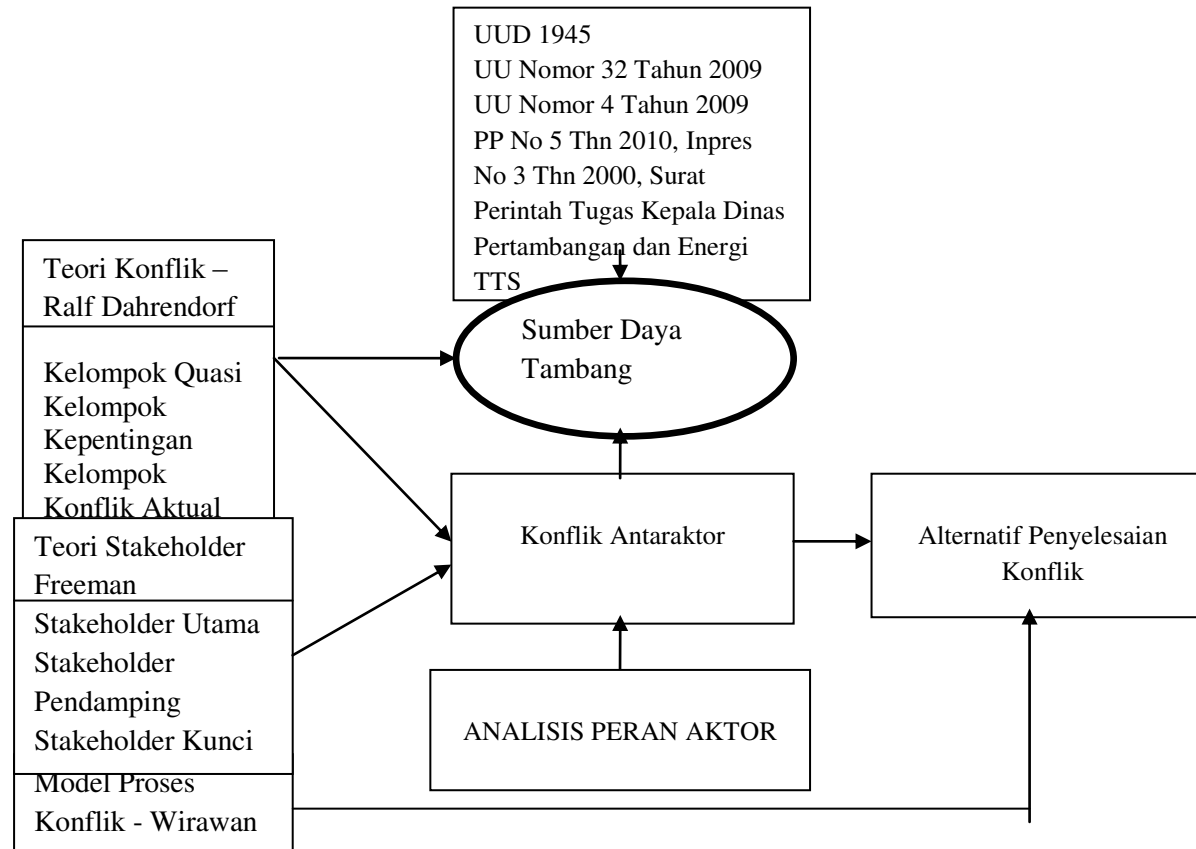
kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki, selama ada konflik kemungkinan aktor yang berposisi di struktur atas bisa dipengaruhi oleh aktor yang berposisi di struktur bawah karena memperbesar kekuasaan atau mendapat dukungan teman seperti formula Wirawan tentang kekuasaan dan resistensi berikut.

**Kekuasaan A terhadap T = Kekuasaan A dikurangi kekuasaan T,**  
yaitu resistensi T terhadap kekuasaan A. Resistensi T terhadap A tergantung  
pada ketergantungan T terhadap kekuasaan A.

Secara singkat, dipahami bahwa adanya resistensi karena ada kekuasaan lain yang memiliki ketergantungan sedikit yang mana telah mendapat dukungan aktor lain, yang dalam konsep Dahrendorf disebut kelompok quasi atau kelompok kepentingan yang tidak nyata tetapi berpengaruh melalui kelompok yang memiliki kepentingan nyata (Obama).

Penjelasan teori yang didasarkan pada permasalahan penelitian dapat ditunjukkan dalam bentuk Bagan 1.1 tentang Kerangka pemikiran seperti di bawah ini.

**Bagan 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data Sekunder Diolah Oleh Penyusun, 2015



Bagan 1.1 diatas menunjukkan bahwa teori konflik Dahrendorf hadir untuk menjelaskan konflik sumber daya tambang dengan tiga konsep utama dalam analisis yaitu kekuasaan, kepentingan dan kelompok konflik sosial. Aktor yang terlibat konflik adalah kelompok quasi/semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik. Kelompok-kelompok tersebut memperebutkan sumber daya tambang yang terbatas lalu menimbulkan konflik. Peran yang ditunjukkan aktor mengeluarkan kebijakan berupa IUP (pemerintah daerah) kepada aktor yang telah memenuhi syarat, dalam hal ini adalah PT SMR. IUP dikeluarkan berdasarkan regulasi seperti UUD 1945, UU Nomor 4 tahun 2009, PP nomor 22 tahun 2010.

Penggunaan teori ini didukung dengan model operasional yaitu model proses konflik Wirawan yang meliputi 7 fase. Selain itu, hadir teori stakeholder Freeman untuk turut menjelaskan aktor dan perannya agar menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian ini.

### A.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif jenis studi kasus yang artinya penelitian yang berfokus pada satu konflik dalam skala lokal dan khusus sehingga dapat mengurai faktor-faktor konflik yang komprehensif dan mendalam. Pertimbangan penggunaan jenis penelitian studi kasus: pertama, studi ini berfokus pada pemahaman mendalam berkaitan dengan peran aktor dalam konflik pertambangan mangan. Kedua, studi ini tidak akan membuat generalisasi diluar kasus yang diteliti seperti pendapat Cowie bahwa studi kasus menekankan pemahaman kasus tanpa ada generalisasi dari kasus yang diteliti (Cowie dalam Alwasilah 2015: 80). Ketiga, studi ini akan dilaksanakan di situs tertentu tanpa membangun teori apapun (Saeidi dalam Alwasilah 2015: 80). Situs yang dimaksud adalah Kabupaten TTS, Provinsi NTT, khususnya wilayah pertambangan yang menjadi lokus konflik yaitu Desa Supul, Desa Lakat, Desa Tubmonas Kecamatan Kuatnana dan Desa Noebesa, Desa Tumu Kecamatan Amanuban Tengah yang menjadi wilayah konflik pertambangan mangan. Selain itu, Dinas ESDM Kabupaten TTS, PT SMR Kabupaten TTS dan Walhi NTT.

Alasan pemilihan situs ini: pertama, situs ini menjadi lokasi pertambangan mangan secara massif sehingga menimbulkan dampak lingkungan dan konflik; kedua, kasus yang terjadi di situs ini berupa konflik pertambangan mangan yang belum diteliti sebelumnya dan menjadi isu penting yang menghadirkan diskursus bagi masyarakat NTT baik di wilayah NTT maupun di luar wilayah NTT.

Sumber data yang digunakan adalah aktor yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti dan berkompeten karena dipilih secara proporsional dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dan didukung dengan teknik *purposve sampling*. Peneliti menentukan satu orang pertama lalu dari orang pertama kemudian berlanjut ke orang kedua yang diarahkan oleh orang pertama tadi. Begitupun selanjutnya hingga mencapai orang yang memberi informasi/data yang lengkap atau jenuh (taraf *redundancy*) Sugiyono (2013: 54-55). Penentuan orang pertama itu secara *purposive* yang artinya ada pertimbangan tentang pengetahuan, pengalaman dan juga kesempatan

yang dimiliki orang tersebut. Sehingga yang menjadi informan adalah 7 Pejabat Pemerintahan Kabupaten TTS, 2 Pimpinan PT SMR, 4 Kepala Desa di wilayah konflik, 4 Tokoh Masyarakat di wilayah konflik, 4 Pemilik Lahan, 1 Peminan Obama. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) teknik observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan secara interaktif antara peneliti dengan sumber data yang menghasilkan data primer. 2) teknik dokumentasi yang menghasilkan data sekunder.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Miles dan Huberman dalam Sugiyono 2013 : 91). Data yang dikumpulkan diawali dengan pemberian kode kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang bersifat naratif.

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah pemeriksaan keabsahan data menurut Lincoln dan Guba (1981) dan Patton (1987) yaitu 1) Derajat Kepercayaan (*Credibility*), penerapan kriteria ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif karena ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; 2) Keteralihan (*Transferability*), penggunaan hasil penelitian pada situasi lain 3) Ketergantungan (*Dependability*), pembimbing membantu mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian 4) Kepastian (*Confirmability*), Kriteria kepastian berarti menguji realitas penelitian untuk mendapatkan manfaat penelitiannya.

#### **A.4. Hasil Penelitian**

Konflik pertambangan mangan melibatkan beberapa aktor dalam konflik yaitu PT SMR sebagai aktor utama konflik dengan peran pelaksana pertambangan, negosiator perdamaian sekaligus aktor tindakan-tindakan konflik, obama sebagai aktor utama konflik dengan peran aktor transaksi jual-bali mangan tak berizin, aktor tindakan-tindakan konflik, Gubernur NTT selaku pemegang kendali kebijakan pertambangan, aktor konflik secara tidak langsung, Bupati TTS selaku pemegang kendali kebijakan pertambangan, aktor konflik sekunder, DPRD Kabupaten TTS sebagai pelaksana pengawasan sekaligus aktor konflik sekunder, Pemilik Lahan sebagai pengawal hak ulayat, aktor konflik sekunder dan Walhi NTT sebagai pengawal lingkungan hidup.

Penyelesaian konflik berdasarkan kekuasaan dan kepentingan masing-masing, begitupun tujuannya. Upaya penyelesaian konflik pertambangan mangan lebih menggunakan pendekatan penegakan hukum positif melalui proses pengadilan sementara penggunaan alternatif penyelesaian masalah hanya pada fase laten dan fase pemicu menurut proses konflik Wirawan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1. Proses Terjadinya Konflik Pertambangan Mangan**

Sub bagian ini akan mencoba menganalisis terjadinya konflik menurut model yang dikembangkan Wirawan (2010). Model tersebut menjelaskan bahwa proses konflik meliputi 7 (tujuh) fase yaitu 1) penyebab konflik, 2) fase laten, 3) fase pemicu, 4) fase eskalasi, 5) fase krisis, 6) fase resolusi konflik dan 7) fase pascakonflik.

#### 1) penyebab konflik

Setiap konflik pasti dipengaruhi oleh faktor sebab yaitu perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dan perbedaan tujuan serta komunikasi dan klarifikasi, inkonsistensi kebijakan kompensasi dan kebijakan tentang pertambangan mangan.

Masyarakat Pemilik Lahan menyediakan lahannya yang mengandung mangan kepada PT SMR sebagai pemilik IUP sehingga konsekuensinya pemilik IUP mengganti sejumlah fasilitas kepada Pemilik Lahan berupa uang dan fasilitas lainnya. Namun beberapa Pemilik Lahan tidak menyerahkan lahannya meski lahannya masuk wilayah IUP PT SMR disebabkan oleh kurang pahamnya masyarakat terhadap pertambangan dan manfaatnya. Hal ini berkaitan dengan cara pandang pemilik lahan bahwa, lahan itu merupakan warisan leluhur untuk menafakahi anak cucu, yang tidak bisa diganti dengan materi apapun termasuk uang sementara PT SMR mengklaim bahwa lahan itu masuk dalam wilayah IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah. Selain itu, lahan yang coba dijual dengan harga tinggi, tetapi tidak disanggupi PT SMR, yaitu luas lahan 4-5 ha harga 1.5M.

Aktor dan sebab konflik lain pada konflik pertambangan mangan adalah a) konflik antara Pemilik Lahan dengan PT SMR, dengan sebabnya: 1) komunikasi yang mandeg, 2) inkonsistensi implementasi kesepakatan, 3) harga mangan yang rendah. b) konflik antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Lahan, dengan sebabnya: 1) meningkatnya nilai ekonomi lahan, 2) pengaruh pihak ke-tiga. c) konflik antara PT SMR dengan Obama, dengan sebabnya: 1) adanya transaksi jual-beli mangan pada wilayah IUP PT SMR, 2) adanya perlawanan Obama terhadap PT SMR. d) konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan DPRD TTS.

#### 2). Fase Laten

Pada konflik tambang mangan, fase ini ditandai dengan adanya kekecewaan pada sebagian anggota PT SMR karena merasa hak IUP diganggu oleh masyarakat Obama. Pemilik Lahan dan Pekerja/Pengumpul mangan merasa rugi karena tenaga yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh dan juga merasa kecewa pada PT SMR karena PT SMR tidak memenuhi kesepakatan bersama dan merasa dimanfaatkan hanya untuk memenuhi kepentingan PT SMR

#### 3) Fase pemicu

Pada fase ini, masing-masing pihak telah menyadari keberadaan konflik. Bentuk ekspresi masing-masing pihak telah terlihat melalui kata-kata maupun tulisan dengan menyadari adanya perbedaan terhadap suatu

objek konflik. Isu yang berkaitan dengan konflik adalah kepemilikan lahan yang mengandung mangan, pasaran mangan. Konflik melibatkan Pemilik Lahan yang satu dengan Pemilik Lahan lain disebabkan klaim lahan yang mengandung mangan. Konflik PT SMR dengan Obama disebabkan pembelian mangan di wilayah IUP.

Sebenarnya para Pemilik Lahan telah membangun dialog untuk menyelesaikan sendiri perbedaan pandangan terhadap lahan. Namun tidak mencapai kesepakatan sehingga hal tersebut dibawa ke Camat Kuantana selaku Hakim Perdamaian di tingkat Kecamatan Kuantana, hasilnya adalah kedua pihak bersepakat agar tidak boleh saling klaim lahan. Pada waktu kemudian PT SMR mendekati keluarga Nesimnasi selaku Pemilik Lahan terluas kedua di Desa Supul sekitar 6 Ha untuk mengajak kerja sama yang bersifat resiprokal - saling menguntungkan yaitu PT SMR membeli lahan tersebut dengantawaran harga sebesar Rp 28.000.000,. namun keluarga Nesimnasi meminta Rp 1M tidak disetujui PT SMR. Dengan demikian tidak terjadi kesepakatan antara PT SMR dengan pihak Nesimnasi. Pada sela-sela kompromi antara PT SMR dengan keluarga Nesimnasi, datanglah keluarga Bula untuk mengklaim lagi lahan yang merupakan milik keluarga Nesimnasi. Aksi klaim tersebut tidak diterima oleh keluarga Nesimnasi

#### 4) Fase eskalasi

Masyarakat Obama bertambah jumlah menjadi lebih dari 116 orang sehingga aktivitas pembelian dan pengangkutan mangan lebih lancar antara Obama dan pemilik lahan, lantas mempengaruhi interaksi dan transaksi jual-beli antara PT SMR dengan masyarakat pekerja, sementara itu masyarakat yang kontra terhadap pertambangan mendapat dukungan yang cukup luas dari beberapa aliansi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup seperti Walhi NTT. Isu yang diperjuangkan adalah pertambangan mangan yang berwawasan lingkungan hidup.

#### 5) Fase krisis

Konflik bila ditinjau secara teoritis dapat dipahami bahwa dapat terjadi bukan hanya secara horizontal tetapi juga vertikal atau struktural karena masing-masing aktor konflik memiliki kekuasaan, menggunakannya bahkan memperbesar kekuasaan itu. Semakin besar kekuasaan seseorang atau kelompok maka semakin besar pula pengaruhnya dalam konflik. Sehingga apabila kekuasaan seseorang atau sekelompok orang kecil maka akan didorong untuk memperbesar kekuasaannya dalam konflik karena belum terpenuhi kepentingannya. Fase dimana konflik semakin meruncing, perilaku emosional juga meningkat dan masing-masing pihak berusaha menyelamatkan diri. Para pelaku konflik berniat menghancurkan lawan dengan cara dan konsekuensi apapun.

#### 6) Fase resolusi konflik.

Upaya kolaboratif antara perusahaan, pemerintah daerah dan aparat keamanan di atas, tidak serta merta menghentikan aktivitas pengumpulan dan penjualan mangan di wilayah IUP PT SMR. Sehingga PT SMR mendatangi Kantor Bupati TTS sebanyak 2 kali dengan tujuan untuk

meminta tindakan penertiban terhadap aktivitas Obama. Permintaan perusahaan sekaligus desakan itu kemudian menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penindakan terhadap perilaku anarkisme Obama.

Peristiwa puncak konflik yang melibatkan PT SMR dan Obama pada tanggal 11 April 2011 tersebut, satu hari setelahnya yakni tanggal 12 april 2011, Pemerintah Kabupaten TTS melalui Dinas ESDM TTS melakukan Telaahan Staf atas peristiwa anarkis penyerangan Kantor dan Gudang PT SMR termasuk karyawannya menemukan hasil yakni adanya permasalahan pertambangan mangan 1) permasalahan harga mangan, 2) tidak adanya perda minerba. Maka saran kepada Bupati TTS adalah 1) membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur Pemda, Polri, dan TNI untuk memberantas/menghentikan aktivitas/kegiatan Obama; 2) membangun Pos Pemantau/Pos Gabungan di lokasi Desa Loli Kecamatan Polen atau batas wilayah Kabupaten TTS dan Kabupaten TTU; 3) perda minerba yang telah disahkan perlu disosialisasikan sehingga dapat diketahui oleh khalayak ramai.

Selain itu aparat polres berhasil menghentikan pembakaran mobil dump truck MAN milik PT SMR 1 unit yang sedang dicuci di sumber air Oemolo Niki-Niki yang sebelumnya Obama telah berhasil merusak Kantor dan Gudang PT SMR. Selanjutnya aparat Polres melakukan upaya penangkapan terhadap Obama mulai dari tanggal 11- 14 April 2011 baru berhasil mengamankan Obama. Lalu para anggota Obama itu ditahan dan disidangkan di pengadilan, atas tindakan pelanggaran hukum maka mereka dipenjara selama mulai dari 6 bulan hingga 2 tahun. Namun upaya ini menuai reaksi dari pendukung dan simpatisan dari masyarakat maka sempat terjadi konflik dan masih terus berlanjut.

## **B.2. *Role Players Analysis* Dalam Konflik Pertambangan Mangan**

### **B.2.1. Pemetaan Players**

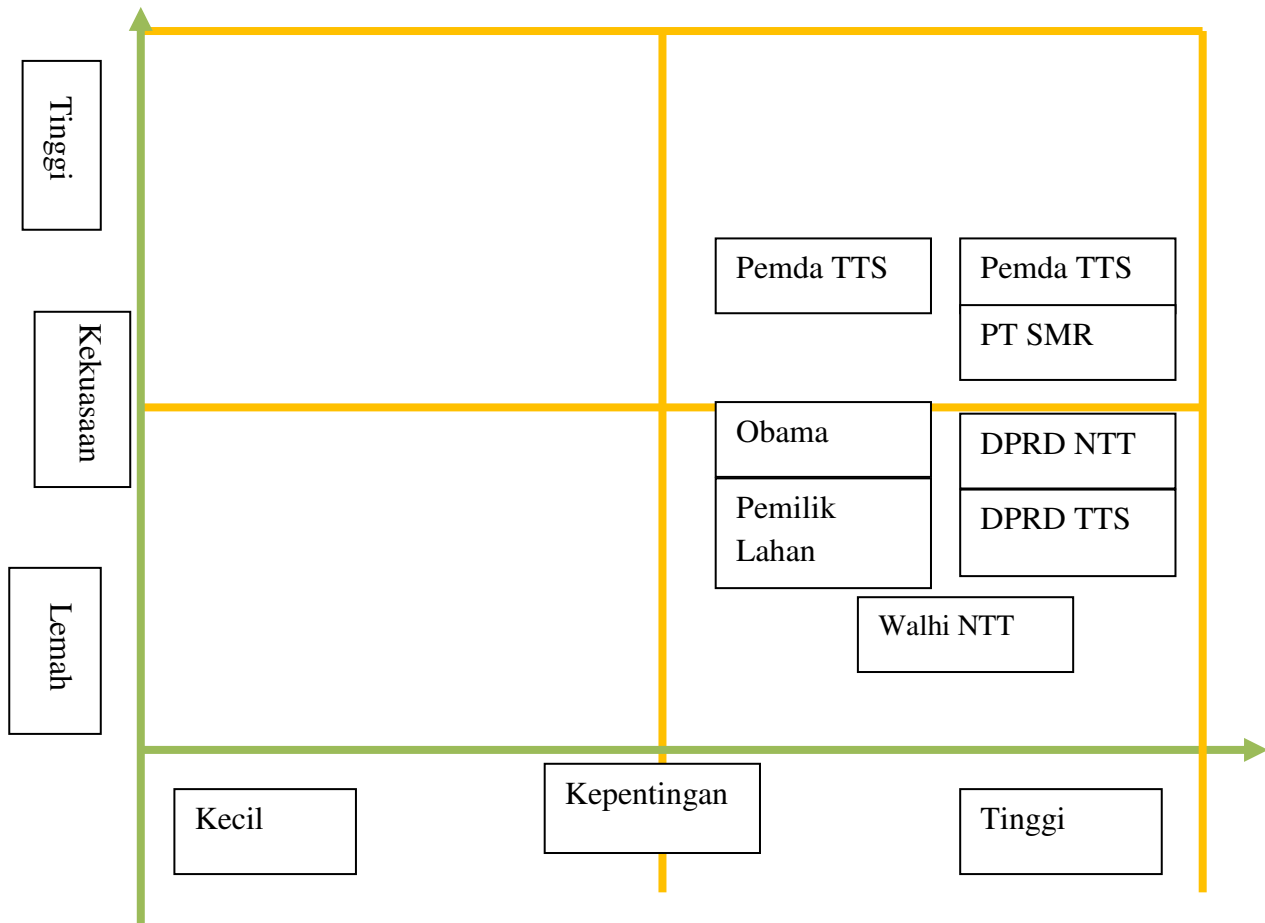
*Role players analysis* atau analisis peran aktor dalam konflik pertambangan mangan dilakukan dengan pendekatan teori stakeholder dengan tujuan untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam konflik beserta perannya masing-masing, selain itu dapat mengetahui motif keterlibatan aktor dalam konflik. Teori stakeholder menurut Freeman (1984) yaitu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi suatu pencapaian tujuan tertentu. Teori ini menjelaskan tipe dan kategori stakeholder, selanjutnya melakukan pemetaan aktor/player berdasarkan tingkat kepentingan dan kekuasaan dalam teori Grid, kaitan dengan kepentingan dan kekuasaan tetap mengacu kepada teori konflik Dahrendorf.

Freeman membuat kategori stakeholder yaitu stakeholder utama, stakeholder yang memiliki kaitan langsung dengan konflik pertambangan mangan,. Stakeholder pendukung, stakeholder yang tidak memiliki keterkaitan langsung tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara; stakeholder kunci,

stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan sesuai dengan levelnya.

Hasil penelitian menunjukkan peran aktor/player dalam konflik pertambangan mangan seperti Gambar 2.1 berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Aktor Konflik Pertambangan Mangan menurut Grid**



Sumber: Data Primer Diolah Oleh Penyusun, 2015

Berdasarkan pemetaan aktor konflik pertambangan mangan pada Gambar 2.1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah NTT, Pemerintah Daerah TTS memiliki tingkat kepentingan dan tingkat kekuasaan yang tinggi dalam konflik pertambangan mangan, karena itu mencerminkan peran yang besar dalam mempengaruhi konflik pertambangan mangan.
2. DPRD NTT, DPRD TTS, Pemilik Lahan, Obama dan Walhi NTT memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi memiliki tingkat kekuasaan yang lemah, karena itu memiliki kepedulian yang tinggi namun kurang berpengaruh dalam konflik pertambangan mangan.

Bila aktor-aktor tersebut dikategorikan menurut Freeman, maka kategorinya sebagai berikut: kategori utama itu adalah PT SMR, Obama

dan Pemilik Lahan; kategori pendukung adalah DPRD NTT, Walhi NTT.; kategori kunci adalah Pemda NTT, Pemda TTS, DPRD TTS. Selanjutnya pengelompokan aktor menurut Dahrendorf, aktor yang termasuk kelompok semu adalah DPRD NTT; kelompok kepentingan adalah Pemda NTT, Pemda TTS, DPRD TTS; kelompok konflik adalah PT SMR, Obama dan Pemilik Lahan.

### **B.2.2. Interaksi Antarplayers**

Interaksi antarplayers dapat menjelaskan tentang peran aktor dalam konflik pertambangan mangan. Interaksi antara satu aktor dengan aktor lain dapat terbangun pola vertikal, horizontal atau diagonal sekaligus menjelaskan peran sesuai dengan kepentingan dan kekuasaan masing-masing aktor.

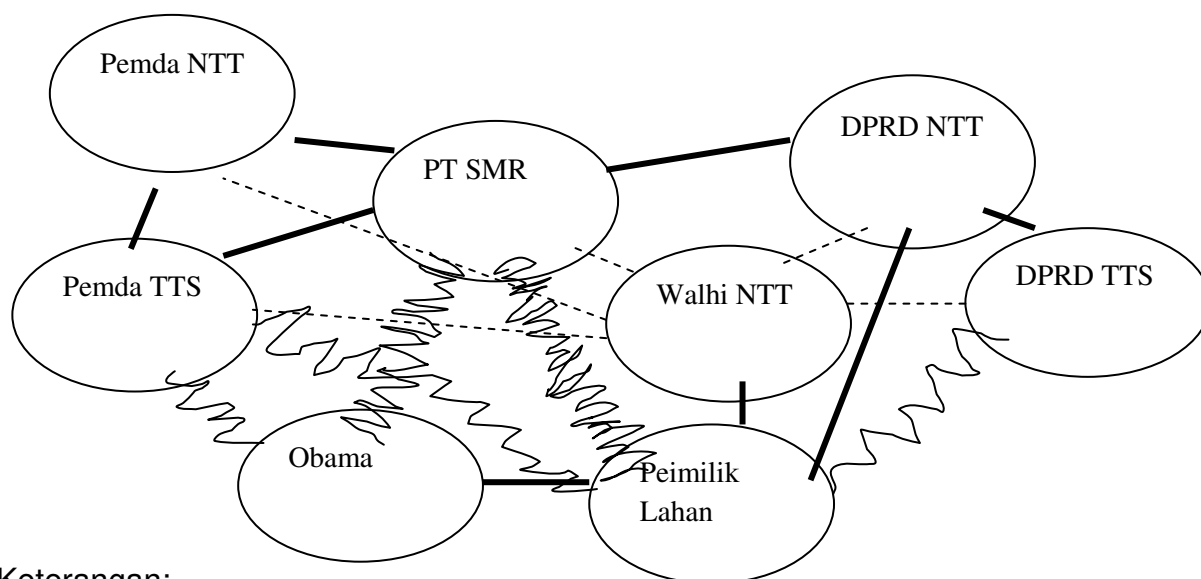
Pemilik Lahan dan Obama melakukan penolakan dengan cara turun langsung ke kantor Bupati TTS dan Gedung DPRD TTS. Tanggapan pemerintah daerah adalah masih dipelajari masalah pertambangan kemudian baru mencari solusi atas permasalahan. Pemerintah Daerah Kabupaten TTS atau dalam hal ini Bupati TTS jika pada waktu pembuatan kebijakan atau penerbitan IUP bagi PT SMR secara terbuka dan melibatkan masyarakat untuk memberikan input sesuai peraturan perundang-undangan maka tentu penolakan tidak terjadi.

Konflik dapat terjadi antara PT SMR dengan Pemilik Lahan berkaitan dengan pelepasan lahan. PT SMR bersama Pemilik Lahan melakukan kesepakatan ataupun bargaining tentang pembebasan lahan melalui penerapan sistem beli putus namun dalam bargaining tidak semua Pemilik Lahan mencapai kesepakatan. Kemudian upaya pembebasan lahan masih terus berlanjut, dengan sistem sewa atau bagi hasil. Ternyata penggunaan sistem bagi hasil juga menuai penolakan masyarakat karena masyarakat menilai bahwa imbalan yang diterima pemilik lahan tidak menunjukkan keadilan.

Pemerintah Daerah melalui fungsi pembinaan dan pengawasan mestinya turun ke lokasi konflik untuk memediasi konflik yang melibatkan PT SMR dengan Pemilik Lahan, apa lagi Pemilik Lahan sudah langsung meminta untuk penyelesaian konflik. Namun kemudian DPRD TTS dan Pemerintah Daerah TTS tergabung dalam tim melakukan peninjauan lokasi pertambangan PT SMR berkaitan dengan dampak pembuangan limbah yang tidak ramah lingkungan. Tim tersebut mendesak PT SMR untuk mengelola limbah secara baik dan ramah lingkungan. Sementara tuntutan pemenuhan janji menjadi tanggung jawab perusahaan dan kaitan dengan peraturan daerah tentang pertambangan mangan juga dijanjikan akan dibahas dan ditetapkan pada tahun 2011.

Selanjutnya interaksi aktor dapat terlihat pada Gambar 2.2 berikut:

**Gambar 2.2**  
**Interaksi Antarplayers dalam Konflik Pertambangan Mangan.**



Keterangan:

1. Garis Turun-Naik Rapat : Konflik
2. Garis Turun-Naik Berjarak : Konflik Sedang
3. Garis Putus : Hubungan Renggang
4. Garis Tebal : Hubungan Baik

Sumber: Data Primer Diolah Oleh Penyusun, 2015

Interaksi aktor dalam konflik yang membentuk pola seperti pada Gambar 2.2 diatas menunjukkan bahwa peran aktor tidak begitu maksimal dijalankan. Artinya bahwa peran yang dijalankan lebih mengedepankan kepentingan masing-masing aktor sehingga konflik sulit diselesaikan. Peran itu dijalankan hanya mengorbankan hak-hak masyarakat dan memenuhi kepentingan aktor yang memiliki kekuasaan yang besar. Ada upaya dari masyarakat untuk menuntut hak baik kepada perusahaan maupun pemerintah daerah tetapi tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan karena masyarakat tidak memiliki kekuasaan untuk mampu mempengaruhi perusahaan dan pemerintah. Meski dalam proses perjuangannya, masyarakat didukung oleh LSM, namun LSM juga tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi perusahaan dan pemerintah daerah. Pada akhirnya dapat dipahami bahwa peran aktor ditentukan oleh tingginya kekuasaan dan kepentingan, yang hal ini nampak dalam struktur sosial masyarakat.

## C. PENUTUP

### C.1. Simpulan

Konflik pertambangan mangan di Kabupaten TTS, Provinsi NTT tahun 2010-2011 yang diekstraksi dalam forma masalah dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:



- a. Konflik pertambangan mangan terjadi menurut 6 fase konflik Wirawan yaitu sebab konflik, fase laten, fase pemicu, fase eskalasi, fase krisis, fase resolusi konflik, hanya fase ke 7 yaitu fase pascakonflik tidak berlaku karena sejak penelitian hingga selesai penelitian, konflik masih berlangsung. Setiap konflik pasti dipengaruhi oleh faktor sebab, dan konflik yang terjadi dipengaruhi oleh perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dan perbedaan tujuan serta komunikasi dan klarifikasi, konsistensi kebijakan kompensasi dan kebijakan tentang pertambangan mangan. Faktor sebab ini mendorong terciptanya konflik yang bersifat laten sehingga mulai nampak karena dipicu oleh kesadaran akan keberadaan konflik, kondisinya berupa persilangan kata, layangan surat atau perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat makin tajam yang menimbulkan frustrasi yang dialami aktor konflik karena tidak tercapai tujuan berupa klaim lahan, tawaran harga lahan, tuntutan pemeliharaan lingkungan hidup. Maka terjadi polarisasi individu atau kelompok untuk saling lawan dan konfliknya memanas karena masing-masing aktor mendapat dukungan. Pada saat ini konflik mengalami eskalasi sehingga aktor tidak lagi mematuhi peraturan sampai terjadinya agresi yaitu terjadi penyerangan terhadap Kantor dan Gedung PT SMR di Desa Supul Kecamatan Kuatnana Kabupaten TTS sampai rusak, lalu terjadi saling serang antara Obama melawan karyawan PT SMR dan pendukungnya. Obama mundur dan menyerang mobil truk yang sedang dicuci di Oemolo, Niki-Niki Kabupaten TTS. Tindakan obama ini cegah oleh aparat kepolisian Kabupaten TTS bersama unsur pemerintahan kabupaten TTS yang terbentuk dalam Tim Koordinasi Terpadu dan menindak secara hukum sebagai tahapan resolusi konflik. Namun konflik masih terus berlanjut karena adanya ketidakpuasan atas penindakan hukum itu, kelompok kontra pertambangan juga terus beraksi didukung Walhi NTT.
- b. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik adalah PT SMR sebagai aktor utama konflik dengan peran pelaksana pertambangan, negosiator perdamaian sekaligus aktor tindakan-tindakan konflik, obama sebagai aktor utama konflik dengan peran aktor transaksi jual-beli mangan tak berizin, aktor tindakan-tindakan konflik, Gubernur NTT selaku pemegang kendali kebijakan pertambangan, aktor konflik secara tidak langsung, Bupati TTS selaku pemegang kendali kebijakan pertambangan, aktor konflik sekunder, DPRD Kabupaten TTS sebagai pelaksana pengawasan sekaligus aktor konflik sekunder, Pemilik Lahan sebagai pengawal hak ulayat, aktor konflik sekunder dan Walhi NTT sebagai pengawal lingkungan hidup.
- c. Upaya penyelesaian konflik berdasarkan kekuasaan dan kepentingan masing-masing, begitupun tujuannya. Penyelesaian konflik itu, lebih menggunakan pendekatan penegakan hukum positif melalui proses pengadilan sementara penggunaan alternatif penyelesaian masalah hanya pada fase laten dan fase pemicu menurut proses konflik Wirawan

## C.2. Saran

Saran yang diajukan adalah:

- a. Pemerintah Daerah NTT, Pemerintah Daerah TTS, perlu membuat kebijakan tentang pertambangan memperhatikan hak-hak masyarakat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup, berupaya mencegah terjadinya konflik terbuka terutama konflik masih dalam kondisi

laten, penyelesaian konflik perlu menggunakan alternatif seperti negosiasi dan rekonsiliasi.

- b. DPRD NTT, DPRD TTS diharapkan melakukan pengawasan sejak Pemerintah Daerah mulai membuat kebijakan tentang pertambangan mangan dan mengawasi proses implementasi kebijakan pertambangan, melakukan investigasi ketika masyarakat mengadukan adanya persoalan pertambangan mangan.
- c. PT SMR agar menunjukkan komitmen dengan mewujudkan kesepakatan-kesepakatan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, menjadi aktor dalam penyelesaian konflik.
- d. Masyarakat sekitar lokasi tambang membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pertambangan mangan melalui keterlibatan dalam dialog dengan perusahaan dan pemerintah daerah.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Affandi, Hakimul Ikhwan. (2004). *Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Alwasilah, A. Chaedar. (2015). *Pokoknya Studi Kasus Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Kiblat Buku Utama
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Kesembilan. Jakarta: Rineka Cipta
- Giddens, Anthony. (2010). *Teori Struktural: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haryanto. (2005). *Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: Program Pascasarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gajah Mada.
- HS, Salim. (2008). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Jamil, M. Mukhsin. (2007). *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: WMC (Walisongo Mediation Centre) IAIN Walisongo.
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pongtuluran, Yonathan. (2015). *Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Publishing
- Prayogo, Dody. (2011). *Socially Reponsible Corporation Peta Masalah, Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Romli, Lili. (2007). *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2008). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta
- (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Sumaryadi, Nyoman I. (2006). *Kebutuhan Masyarakat Madani Perspektif Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia
- Sukandarrumidi. (2009). *Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Suparmoko. (1989). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada
- Sugiyanto. (2002). *Menguak Peluang dan Tantangan Administrasi Publik: Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik*. Jakarta: LAN
- Suyanto, Bagong dan M. Khusna Amal. (2010). *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika
- Wuryandari, Ganewati. (2014). *Pengembangan Wilayah Persepektif Sosial: Permasalahan dan Kebijakan*. Jakarta. LIPI Press Anggota of Ikapi
- Zulkifli, Arif. (2014). *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Timor Tengah Selatan Dalam Angka (2014). Timor Tengah Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan

Timor Tengah Selatan Dalam Angka (2012). Timor Tengah Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan

### Tesis

- Ahmad, Elisyana. 2014. *Anatomi Konflik Kegiatan Eksplorasi Pertambangan PT. Cahaya Manunggal Abadi (PT CMA) di Kawasan Pertambangan Emas Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Sahani. 2006. *Konflik Pengelolaan Pertambangan Timah di Kabupaten Bangka Belitung : Studi Tentang PT Timah Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Bangka dan Asosiasi Industri Timah Indonesia*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Sayekti, Bayu. (2011). *Proyeksi Endapan Fosfat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Prosiding Hasil Kegiatan Pusat Sumber Daya Geologi: 11.17
- Se'u, Windynia G.G. 2013. *Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap pertambangan Mangan*. Tesis. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana
- Widiarti, Maulidya. 2012. *Relasi Penguasa-Pengusaha di Bumi Antasari Studi Kasus: Aktivitas Pertambangan Emas Hitam di Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

### Jurnal

- Adib, Muhammad. (2012). *Agen dan Struktur Dalam Pandangan Pierre Bourdieu. Biokultur. Nomor 2. Vol 1 Juli: 95-96*
- Astuti, Eka Z.L. (2012). *Konflik Pasir Besi: Pro Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, No. 1. Vol. 16 Juli: 63.
- Cahyono, Moch. Farid dan Hasby Yusuf. "Masalah Eksternalitas dan Bagi Hasil Tambang dalam Konflik Enam Desa di Maluku Utara". Paper. No. 4 (2013), hal 1-14
- Dermanto, Argyo. (2010). *Strukturalisme Konflik: Pemahaman Akan Konflik pada Masyarakat Industri Menurut Lewis Coser dan Ralf Dahrendorf*. Dilema. No. 1 vol. 24: 4-5

Febryano, Indra Gumay dkk. "Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Indonesia". Jurnal Analisis Kebijakan. Vol. 12. No 2 (2015), hal 125-142

Haryanto. (2009). Elit Politik Lokal Dalam Perubahan Sistem Politik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, No 5 November: 135-136.

H.S, H Salim dan Idrus Abdullah. (2012). Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa Antara Masyarakat samawa Dengan PT Newmont Nusa Tenggara. No 3 (Oktober): 476-488

Jati, Wasisto Raharjo. "Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Paradigma Ekologi Politik". Jurnal Ilmu Politik. Vol. 3 No. 2 (2012), hal 98-111

McKinnon, Jesse D. (2003). *The Effect of Sociodemographic, Familial and Residential Variables in Explaining Mortality Differentials: A Comparison of The Dahrendorf and Weberian Social Class Models. Dissertation.* Washington, D.C: Howard University.

Muhammad, Adib. (2012). Agen dan Struktur Dalam Pandangan Piere Bourdieu. Biokultur. No 2. Vol. I Juli: 95-96.

Sihotang, K. J. 2012. Struktur dan Kultur Dominasi: Relasi Agensi dan Strukturasi Dalam Pembentukan Kultur TNI Angkatan Darat Pada Era Reformasi. Sosiologi Reflektif. No. 2. Vol. 6. April: 79-80

Tittenbrun, Jacek. *Ralph Dahrendorf's Conflict Theory of Social Differentiation and Elite Theory.* Innovative Issues and Approaches in Social Sciences. No. 3. Vol. 6: 117

### **Majalah**

Firmanto, Andri B. 2012, Desember. Pengendalian Degradasi Lingkungan. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Warta Minerba: 6-7

Laporan Tahunan PT SMR 2012

Profil Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

RPJM Daerah Kabupaten TTS 2012-2032

### **Internet**

<https://www.aifis.org/wp-content/upload/2013/12/Dilema-24-2010.pdf> Diunduh pada 7 April 2015 pukul 09:30 WIB

<https://www.lintasntt.com>. Diunduh pada 12 April 2015 pukul 08:30 WIB

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara  
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

**POLI  
TIKA,  
Vol.  
7,  
No.1**

**,  
April  
2016**

-----